

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOTA DINAS

NOMOR : 56/IP.00/2025

Yth : Daftar terlampir
Dari : Plt. Kepala Biro Komunikasi Dan Informasi Publik
Hal : Permohonan Data Uji Konsekuensi
Lampiran: -
Tanggal : 14 Juli 2025

Dalam rangka Implementasi Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya yang terkait dengan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan (Pasal 17), maka PPID Kementerian PANRB akan melakukan persiapan kegiatan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang ada di Kementerian PANRB.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Mohon agar dapat mendata judul informasi/ data yang akan diuji konsekuensi, dan;
2. Berdasarkan judul informasi tersebut, mohon kesediaannya untuk dapat melengkapi formulir matriks uji konsekuensi yang dapat di unduh pada link <https://drive.google.com/...> dan dapat kami terima kembali selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2025;
3. Matriks dimaksud terdapat pada bagian Sheet "isi" dengan pilihan jawaban Ya/Tidak. Pengisian matriks akan dilanjutkan dengan rapat uji konsekuensi secara daring yang pelaksanaannya akan diinformasikan kemudian;
4. Mohon agar data informasi dan matriks uji konsekuensi tersebut dapat kami terima pada kesempatan pertama melalui Nota Dinas, agar dapat segera dilakukan Uji Konsekuensi oleh Tim PPID Kementerian PANRB;
5. Untuk informasi lebih lanjut terkait pengisian matriks, mohon dapat menghubungi Biro DAKIP/PPID u.p. Sdri Nadya

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya yang sangat baik kami haturkan terima kasih.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250714WCDT



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MOHAMMAD AVERROUCE

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

NIP. 198003052003121002

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250714WCDT



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN

Nomor : 56/IP.00/2025

Tanggal : 14 Juli 2025

Daftar Penerima :

1	Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan	Nurhasni
2	Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik	Akik Dwi Suharto Rudolfus
3	Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	Diah Faras
4	Sekretaris Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah	Aan Syaiful Ambia
5	Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Erni Herawati
6	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Ario Wiriandhi
7	Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Ronald Andrea Annas
8	Inspektur	Dadan Kusnindar
9	Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum	Sri Rejeki Nawangsasih
10	Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi	Perwita Sari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250714WCDT



Balai
Sertifikasi
Elektronik